

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN*Kristiani Jelsi¹, Dewiana Anjela²**St Paulus Ruteng**e-mail: jelsikristiani35@gmail.com¹, anjeladewiana16@gmail.com²*

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2025-7-30**Review** : 2025-7-30**Accepted** : 2025-7-30**Published** : 2025-7-30

KATA KUNCI

Problematika Pendidikan,
Kesenjangan Akses.**A B S T R A K**

Problematika pendidikan merupakan isu kompleks yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kesenjangan akses hingga tantangan kualitas dan relevansi. Kesenjangan akses ke pendidikan menjadi masalah utama, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan pulau-pulau kecil, dimana banyak anak tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Faktor geografis, ekonomi, dan sosial menjadi penghalang utama dalam memberikan akses yang merata. Kualitas guru dan tenaga pendidik juga menjadi sorotan, dengan masih banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar dengan efektif. Kurikulum yang kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja juga menjadi masalah, sehingga lulusan pendidikan kurang siap menghadapi persaingan global. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi kendala, dengan banyak sekolah yang memiliki fasilitas yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil. Kesenjangan digital juga semakin menjadi masalah, dengan banyak siswa yang kesulitan mengakses internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran. Kurikulum yang kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja juga menjadi tantangan, sehingga lulusan pendidikan kurang siap menghadapi persaingan di dunia kerja. Untuk mengatasi problematika pendidikan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan akses, peningkatan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum, penyediaan infrastruktur yang memadai, hingga penanganan kesenjangan digital. Kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua anak.

Keywords: *Educational Problems, Access Gaps.*

ABSTRACT

Education problems are complex issues that cover various aspects, from access gaps to challenges of quality and relevance. The gap in access to education is a major problem, especially in rural, remote, and small island areas, where many children do not have equal

opportunities to access quality education. Geographical, economic, and social factors are major barriers to providing equal access. The quality of teachers and educators is also in the spotlight, with many teachers still not meeting the competency standards needed to teach effectively. The curriculum that is less relevant to the development of the times and the needs of the world of work is also a problem, so that education graduates are less prepared to face global competition. In addition, the quality of educational facilities and infrastructure is still an obstacle, with many schools having inadequate facilities, especially in remote areas. The digital divide is also increasingly a problem, with many students having difficulty accessing the internet and digital devices to support learning. The curriculum that is less relevant to the development of the times and the needs of the world of work is also a challenge, so that education graduates are less prepared to face competition in the world of work. To overcome these educational problems, comprehensive efforts are needed, starting from increasing access, improving teacher quality, improving the curriculum, providing adequate infrastructure, to handling the digital divide. Government policies, community participation, and collaboration between various parties are needed to realize quality and equitable education for all children.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Ia menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Lebih dari sekadar proses transfer pengetahuan, pendidikan juga berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, moral, dan kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kemajuan dan keberlangsungan suatu negara. Di Indonesia, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan guna memperbaiki sistem pendidikan nasional, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sektor ini masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan mendalam. (Fita Elisia Azisah et al., 2021)

Salah satu problematika utama dalam pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses pendidikan. Banyak anak di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang belum dapat menikmati layanan pendidikan secara layak. Ketiadaan sekolah, minimnya tenaga pendidik, sulitnya akses transportasi, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor-faktor penyebab utama ketimpangan tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Di sisi lain, kualitas pendidikan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Permasalahan ini mencakup rendahnya kompetensi guru, belum meratanya distribusi fasilitas pembelajaran, dan kurang relevannya kurikulum dengan (Fita Elisia Azisah et al., 2021) tuntutan dunia kerja maupun perkembangan zaman. Masih banyak sekolah

yang mengalami kekurangan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta media pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

Selain itu, tantangan dalam bidang karakter dan moral peserta didik juga semakin mengemuka. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi global, pendidikan karakter menjadi hal yang semakin mendesak. Namun dalam kenyataannya, pembinaan karakter sering kali belum mendapatkan porsi yang seimbang dalam sistem pendidikan. Kasus perundungan (bullying), intoleransi, dan perilaku menyimpang di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pendidikan moral belum sepenuhnya berhasil diterapkan secara efektif. (Husaini, 2014)

Transformasi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 yang lalu mempercepat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, namun juga mengungkapkan kesenjangan digital yang lebar antara peserta didik dari kalangan ekonomi atas dan bawah. transformasi digital dalam pendidikan menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan akses teknologi, kurangnya keterampilan digital di kalangan pendidik, serta infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Banyak siswa tidak memiliki perangkat pembelajaran daring atau akses internet yang stabil, sementara guru belum sepenuhnya siap secara digital untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. (Pendidikan, 2024)

Keseluruhan problematika ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional membutuhkan pembenahan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, institusi pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat luas dalam merancang solusi yang tepat sasaran. Pendekatan yang komprehensif dan berpihak kepada peserta didik sangat dibutuhkan agar pendidikan tidak hanya menjadi slogan pembangunan, tetapi benar-benar menjadi jalan pembebasan dan pemberdayaan.

METODE

Metode yang digunakan peneliti yaitu Literature Review dengan jenis Scoping review yang merupakan metode dengan cara mengidentifikasi literature yang ada secara menyeluruh dan mendalam serta memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti (Utami dkk., 2021). Scoping review bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya dengan cara mencari sumber artikel penelitian serupa kemudian dikelompokkan dan menjadi kesimpulan. Database yang digunakan dalam penelitian berdasarkan publikasi ilmiah nasional dan internasional seperti ScienceDirect, PubMed, Scopus, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan yaitu transformasi, digital, Pendidikan. (Pendidikan, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan pendidikan ialah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan pendidikan, dan keduanya memiliki arti yang sangat luas. Politik, keputusan, kekuasaan, konvensi, aturan dan norma, rencana strategis, dan program semuanya disebut sebagai kebijakan (policy). Sesuai dengan arti penting dari Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa strategi dapat diartikan sebagai suatu keahlian, pengetahuan, kelihaihan, yang juga dipandang sebagai suatu perkembangan gagasan dan kaidah yang melandasi perencanaan dalam melakukan suatu penyelenggaraan, tugas, dan pendekatan bertindak dari suatu administrasi, asosiasi dan menjadi aturan dalam memimpin administrasi untuk mencapai suatu tujuan (Saleh, 2020). Menurut para ahli atau cendekiawan yang ikut memahami perasaan mereka yang

berbeda sehubungan dengan pentingnya strategi untuk menjadi siklus dalam arah, seperti yang digambarkan oleh Koontz & Donnel (1980) menyatakan bahwa strategi ialah pemahaman umum yang berubah menjadi pembantu dalam masalah navigasi. yang memiliki pusat pembatas dalam mengejar suatu pilihan. Dalam pengertian lain, kebijakan ialah seperangkat rencana atau tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti oleh pelaku atau bahkan kelompok pelaku untuk memecahkan masalah (Saleh, 2020). Ahli lain mengatakan bahwa kebijakan ialah bagian dari perencanaan yang membantu lembaga pemerintah, kelompok, pejabat, atau aktor di bidang tertentu membuat keputusan tentang sumber daya, waktu, dan tenaga untuk mencapai suatu tujuan dengan kata lain bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan akan sangat bergantung pada perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan sumber daya manusia (Merentek et al, 2023). Karena sama-sama menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang sudah tersedia, maka kebijakan dan proses pengambilan keputusan sangat erat kaitannya. Ketika tahapan proses diarahkan pada pengambilan keputusan, kebijakan ialah prinsip atau metode yang dipilih. Dengan maksud mencapai tujuan organisasi tertentu, kebijakan menjadi keputusan dalam organisasi (Ali et al, 2022). Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian kebijakan ialah seperangkat aturan tertulis yang menjadi keputusan formal dalam ranah organisasi yang mengikat dan mengatur tindakan atau perilaku seseorang sehingga tujuan tersebut dapat menghasilkan norma dari pengertian kebijakan yang banyak dan beragam yang diberikan oleh para ahli. dan angka di atas. atau seperangkat nilai sosial baru. Kebijakan tersebut nantinya menjadi acuan utama bagi perilaku anggota lembaga atau masyarakat. Kebijakan itu sendiri bersifat proaktif dan solusi pemecahan masalah. Meskipun mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, kebijakan juga memiliki karakteristik adaptif dan interparatatif. Selain itu, diantisipasi bahwa kebijakan nantinya bersifat umum tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek tertentu dari lingkungan setempat. Carter menyatakan bahwa pengertian kebijakan pendidikan ialah penilaian institusional terhadap sistem nilai dan berbagai faktor kebutuhan situasional yang menghasilkan rencana umum untuk memandu pengambilan keputusan. Definisi kebijakan pendidikan ini nantinya dibahas dalam pernyataan berikut. suatu keputusan yang dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, undang-undang pendidikan yang disahkan di Jepang pada tahun 1947 memiliki beberapa aspek yang menarik dari konstitusi negara tersebut. Asas legalisme, asas pemerintahan demokratis, asas netralitas, asas penyesuaian dan pembentukan kondisi pendidikan, dan asas desentralisasi semuanya termaktub dalam undang-undang ini (Ali et al, 2022). Legislasi dan peraturan mengatur manajemen, sesuai dengan prinsip legalisme. Sebelum episode The Second Great War (Perang Besar Kedua) masalah bidang pendidikan telah dipilih dengan peraturan yang sangat baik dan juga penilaian parlemen, pada saat itu kehadiran penduduk diabaikan sehingga mereka tidak menjadi bagian dari para spesialis setuju atau bertentangan dengan strategi instruktif yang dibuat. Namun, isu-isu terkait pendidikan telah diatur oleh undang-undang dan peraturan parlemen sejak reformasi pendidikan pasca-Perang Dunia II. Sistem administrasi pendidikan harus dibangun sesuai dengan konsensus nasional dan juga harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam menyusun kebijakan dan prosedur pendidikan, sesuai dengan prinsip administrasi demokrasi. Standar netralis memastikan pengaturan instruktif bahwa pendekatan instruktif harus otonom dan tidak dapat ditengahi atau dipengaruhi oleh isu-isu kepentingan politik. Sesuai dengan asas penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, maka menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan memfasilitasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip terakhir, yang disebut desentralisasi, mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan harus didasarkan pada otonomi pemerintah daerah karena pendidikan ialah tugas pemerintah (Machali, 2018). Kebijakan pendidikan, menurut Prasojo, ialah skala pendidikan yang didasarkan pada sistem nilai dan evaluasi faktor situasional. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menjadi landasan untuk menjalankan suatu lembaga pendidikan. Lebih jauh lagi, pemikiran juga menjadi tujuan umum untuk digunakan sebagai sumber arahan dalam menentukan pilihan untuk mencapai tujuan institusional seperti yang digambarkan sebelumnya. Karena kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor utama dalam mencapai keunggulan dan membuktikan eksistensi negara-bangsa dalam menghadapi persaingan global, maka sangat perlu diprioritaskan agar dapat lebih mendalam, kritis, dan penelitian yang komprehensif (Machali, 2018). Dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa kebijakan pendidikan merupakan produk yang menjadi tolak ukur atau pedoman dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam konteks lingkungan yang legal, netral, dan berwawasan sedang. Selain itu, kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang dibuat dan direncanakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang timbul di bidang pendidikan. Tujuannya ialah agar kebijakan pendidikan berfungsi sebagai panduan untuk tindakan dan berkembang menjadi pendekatan baru untuk mencapai visi dan misi organisasi. tujuan instruktif mulai dari otoritas publik atau bahkan dari lembaga penghibur lainnya yang ikut mengkoordinasikan dan mengawasi pendidikan di negara yang sebenarnya (Machali, 2018). Penelitian yang dilaksanakan oleh Saleh (2020) menemukan bahwa masalah utama yang dihadapi siswa saat ini telah mengakibatkan pergeseran dari lingkungan belajar offline ke online, yang memerlukan pengembangan lingkungan belajar yang positif untuk membangkitkan minat mereka dalam pendidikan online; membangun kawasan lokal belajar; memberikan umpan balik secara cepat dan konsisten; Terlebih lagi, manfaatkan inovasi yang tepat untuk menyampaikan kebahagiaan yang tepat. Tenaga pengajar atau guru tentunya bertanggung jawab atas dampak selanjutnya. Ia tentu saja bertanggung jawab atas proses pembelajaran anak didiknya sebagai seorang pendidik; Namun, pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan WFH juga berdampak pada proses pembelajaran karena sejumlah faktor yang membuat guru kesulitan dalam melaksanakannya. Pendidikan daring meliputi: 1) Informasi Terbatas tentang Inovasi; (2) Keterbatasan sarana dan prasarana; selanjutnya (3) Pembatasan Peluang Berbasis Web untuk Pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan Nasution (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa setiap bangsa harus memperhatikan pendidikan secara serius, karena pendidikan memungkinkan seseorang untuk mengamati kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Sudah sewajarnya bangsa Indonesia tidak ingin hidup di negara yang terbelakang karena pendidikan tidak mendapat perhatian yang cukup seiring dengan kemajuan lainnya. Aspek kepemimpinan atau pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, berdampak pada aspek fundamental pembangunan pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan, pada gilirannya, ialah untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dan membantu mereka berkembang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas, kebijakan pemimpin harus merata di setiap daerah. Namun, harus kita akui bahwa masalah pembangunan pendidikan ialah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah. Rozak (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kebijakan organisasi pendidikan dimaksudkan

untuk berfungsi sebagai pedoman dalam praktek, mengarahkan kegiatan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ialah kebijakan strategis yang dilaksanakan Ditjen Dikdasmen pada masa otonomi daerah: 1) Manajemen Berbasis Sekolah, 2) Pendidikan Berbasis Partisipasi Masyarakat, 3) pemanfaatan paradigma pembelajaran, dan 4) pengenalan oleh pemerintah terhadap pendidikan yang mengambil pendekatan Broad Base Education System (BBE). Siklus eksekusi strategi dapat dimulai dengan asumsi tujuan dan target yang awalnya bersifat luas telah dirinci, program kegiatan telah direncanakan dan berbagai aset/biaya telah dikeluarkan untuk memahami tujuan dan sasaran tersebut. Di Era Otonomi, evaluasi kebijakan pendidikan masih belum terformat dengan jelas, sehingga program peningkatan mutu pendidikan masih dilaksanakan dengan berbagai cara. Akibatnya, perlu untuk memeriksa aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk mengevaluasi efektivitas pembuatan kebijakan. Problematika Pendidikan di Indonesia Sejarah pendidikan Indonesia membuktikan bahwa memang disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Pendidikan nantinya diarahkan ketika penguasa membutuhkan kekuatan politik ke arah itu. Kekuatan politik pendidikan dimaksudkan untuk melayani kepentingan berbagai pihak yang berkuasa, jika ditelaah lebih jauh. Inisiatif seperti ini sangat memengaruhi dunia sekolah, di mana aturan-aturan penting dipusatkan bukan pada mengacu pada keterampilan yang luar biasa, melainkan pada arahan dari bos. Hal ini membuat pertemuan yang tidak dapat dipercaya menjadi tidak menentu sehingga dapat menghilangkan kebebasan dan otoritas profesional. Karena itu, pendidikan pada akhirnya menghasilkan individu-individu penurut yang tidak berani mengambil keputusan dan terkesan bermain pura-pura. Kami sangat percaya bahwa otoritas baru ini nantinya mengubah pelatihan, sehingga masalah di bidang pendidikan dapat diselesaikan dan dapat mengarah ke jalur yang lebih baik untuk kemajuan negara. Menyadari bahwa kesulitan dan tuntutan dunia pendidikan, serta kompleksitas permasalahan sosial, menjadi semakin kompleks. Dengan harapan bahwa pendidikan dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul di dunia yang semakin saling berhubungan, banyak orang yang mendorong dan menyampaikan aspirasinya terhadap lembaga pendidikan. Judul dan jenis perubahan instruktif mana yang nantinya dipengaruhi oleh inisiatif (Suhariadi et al, 2023). Untuk mempertahankan status quo, kepentingan ideologi dan politik antara lain memanfaatkan pendidikan sebagai alat. Misalnya, pendidikan cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru, sehingga menghilangkan esensi pendidikan yang sejati. Bahkan pendidikan digunakan untuk mengindoktrinasi individu ke dalam masyarakat. Sistem pendidikan selama masa Pemerintahan Baru, pelaksanaan instruksi secara langsung dibatasi oleh kerangka peraturan dengan rantai yang sangat panjang dari tingkat fokus ke lokal dan bahkan ke tingkat unit pelatihan. Kepemimpinan semacam ini tidak diragukan lagi berdampak pada pendidikan, di mana tindakan pendidik sekarang dipandu oleh arahan dari atasan daripada perilaku profesional. Situasi seperti ini mengarah pada sikap pilih kasih terhadap atasan dan hilangnya hak dan otoritas profesional. Pendidikan, di sisi lain, menghasilkan individu-individu penurut yang takut membuat pilihan; tidak ada kemandirian karena lebih banyak paksaan dan kepura-puraan (Suhariadi et al, 2023). Saat ini, kekuatan politik praktis mendominasi pendidikan nasional. Hal ini membuktikan bahwa partai politik telah memasukkan pendidikan dalam perebutan kekuasaannya.(Tintingon et al., 2023)

KESIMPULAN

Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan globalisasi. 2. Berbagai persoalan pembelajaran terutama yang menyangkut metode pembelajaran yang tepat bagi anak didik perlu dicari jalan tengah yang terbaik sebagai solusinya. 3. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa yang akan datang akan semakin kompleks, sehingga guru dituntut untuk melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fita Elisia Azisah, Diah Sudiarti, & Haning Hasbiyati. (2021). Identifikasi Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta) Di Taman Botani Sukorambi Kabupaten Jember Untuk Menunjang Mata Kuliah Taksonomi Tumbuhan. *Jurnal Bioshell*, 10(2)(2), 55–65.
- Husaini. (2014). Pembinaan Pendidikan Karakter. *Jurnal Tarbiyah*, 21(1), 75–95.
- Pendidikan, P. S. D. M. (2024). 1, 2 1, 2. 5(4), 1075–1083.
- Tintigon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>.